

Perencanaan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Samsuddin Amin*, Nurmaida Amri, Idawarni, M. Yahya, Edward Syarif, Nurul Nadjmi
Departemen Arsitektur Universitas Hasanuddin
Email: samsuddin@unhas.ac.id*

Abstrak

Desa Wisata merupakan salah satu alternatif upaya pemberdayaan melalui pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan potensi wisata yang ada di desa. Ukuran keberhasilan program Desa Wisata dapat dilihat pada grafik pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di desa sebagai implikasi dari penerapan program pelibatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Komitmen para pemangku kepentingan dalam implementasi program Desa Wisata juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah desa, pengusaha lokal, dan masyarakat desa termasuk tokoh pemuda, dan alim ulama merupakan kata kunci dalam mengantungi cita-cita tinggi terhadap keberhasilan implementasi program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata. Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng secara topografis memiliki bentang alam yang sangat kompetitif untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata berbasis panorama alam. Permasalahan utama yang ada di desa ini adalah infrastruktur jalan yang belum memadai dalam mengakses spot potensial kepariwisataan, terbatasnya prasarana dan sarana pendukung seperti *homestay* serta sarana pendukung lainnya. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengeksplorasi potensi kepariwisataan khususnya yang terkait dengan potensi panorama alam untuk kemudian diterjemahkan menjadi *spot* wisata yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat berbasis program-program pemberdayaan. Metode pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dimulai dari kegiatan observasi lapangan yang diikuti dengan kegiatan analisis potensi dan masalah yang ada terkait rencana pengembangan Desa Wisata di lokasi pengabdian. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusiasme, serta tingkat pemahaman dan penerimaan yang signifikan terkait dengan desain *spot* pariwisata berbasis panorama alam di lokasi pengabdian dengan angka signifikansi sebesar 67% dari 30% sebelum kegiatan menjadi 97% setelah pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Desa Wisata; Pemberdayaan; Ekonomi; Pengabdian kepada Masyarakat; Desa Sering.

Abstract

Tourism Village is one of the alternative empowerment efforts through community involvement in the management of tourism potential in the village. The measure of the success of the Tourism Village program can be seen in the graph of the economic growth of the community in the village as an implication of the implementation of an empowerment-based community involvement program. The commitment of stakeholders in implementing the Tourism Village program is also the key to success. The village government, local entrepreneurs, and village communities including youth leaders, and ulama are the key words in hanging high ideals for the successful implementation of community empowerment programs in Tourism Villages. Sering Village, Donri-donri District, Soppeng Regency, topographically has a very competitive landscape to be developed into a tourism village based on natural panoramas. The main problems in this village are inadequate road infrastructure in accessing potential tourism spots, limited infrastructure and supporting facilities such as home stays and other supporting facilities. The purpose of this community service activity is to explore the potential of tourism, especially those related to the potential for natural panoramas to then be translated into tourist spots which are expected to contribute to improving the community's economy based on empowerment programs. The method of implementing the activities formulated by the Community Service Team of the Department of Architecture, Faculty of Engineering, Hasanuddin University, started from field observations followed by analysis of potential and existing problems related to the tourism village development plan at the service location. The results of the implementation of the activity showed enthusiasm, as well as a significant level of understanding and acceptance related to the design of tourism spots based on natural panoramas at the service location with a significance number of 67% from 30% before the activity to 97% after the activity.

Keywords: Tourism Village; Empowerment; Economy; Community Service; Sering Village.

1. Pendahuluan

Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi), warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran. Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat. Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang di dalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata minat khusus. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut. Masyarakat lokal pada pengembangan desa wisata memiliki peranan yang cukup besar, dimana masyarakat yang mengoperasikan dan mengontrol berjalannya pengembangan desa wisata baik dari penentuan produk hingga manfaat yang diterimanya. Manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal adalah mendorong kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan alam sehingga mampu menyerap tenaga masyarakat lokal, menciptakan wirausaha, dan menciptakan kegiatan positif di bidang pertanian (Masitah, 2019).

Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan desa wisata yakni bagaimana masyarakat bisa didorong dan dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga potensi yang dimiliki desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Melalui penggalian potensi desa dan masyarakat secara berkesinambungan maka pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Dengan demikian, perkembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalian potensi-potensi wisata itu sendiri mulai dari dilevel daerah atau yang paling rendah (Trisnawati, et al., 2018).

Selain aspek pemberdayaan sektor ekonomi, konten lokal menjadi sesuatu yang dapat dijadikan modal dalam mengembangkan Desa Wisata yang berkarakter. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Komariah dkk., (Komariah et al., 2018) yang menjelaskan bahwa untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, harus melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun kelompok masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kegiatan pelestarian kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok ini sebagai wujud konkret tindakan masyarakat yang peduli terhadap kawasan wisata sekaligus potensi sumber daya alam lainnya. Melalui sebuah komunitas pemeliharaan kelestarian alam bisa diwujudkan. Wujud kearifan lokal ada di dalam kehidupan masyarakat yang mengenal dengan baik lingkungannya, masyarakat

hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, memahami cara memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kearifan lokal dalam wujud pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan wujud konservasi masyarakat. Hal ini menjadi modal awal yang besar di dalam membangun sebuah desa wisata. Modal utama pengembangan desa wisata adalah terdapatnya penerimaan dan komitmen dari masyarakat setempat pada kegiatan pariwisata. Hal ini berarti terdapat sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Dalam aktivitas pariwisata akan terjadi komunikasi dan interaksi antara masyarakat setempat dengan wisatawan. Hal tersebut membuat masyarakat setempat harus sudah siap menerima perubahan sosial yang akan terjadi dengan tetap dalam koridor sosial budaya lokal. Untuk membangun masyarakat memiliki sikap terbuka terhadap pariwisata, perlu adanya motivasi yang kuat dari masyarakat setempat. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki motivasi dalam menjaga karakter dari lingkungan fisik alam pedesaan, sosial, dan budaya yang berkembang pada masyarakat. Motivasi masyarakat merupakan faktor yang mendasar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Apabila motivasi melestarikan itu tidak berkembang maka keunikan dari lingkungan sosial dan budaya akan hilang. Apabila hal itu terjadi, para wisatawan tidak akan tertarik lagi untuk berkunjung sehingga kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali.

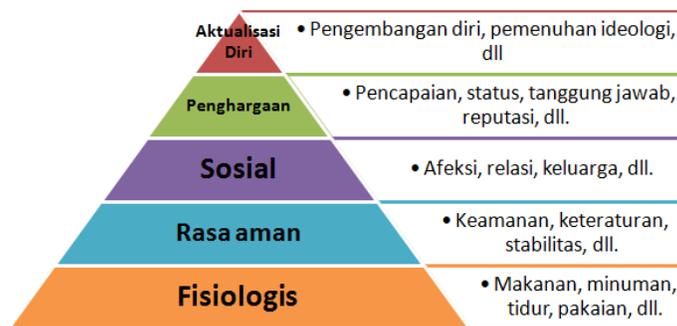
Permasalahan terkait pengembangan Desa Wisata di lokasi pengabdian terletak pada keterbatasan infrastruktur jalan untuk mengakses *spot* lokasi strategis yang memiliki bentang alam perbukitan dengan pemandangan dan panorama yang eksotis. Selain itu, *spot* lokasi pengabdian juga memiliki keterbatasan dari aspek ketersediaan prasarana dan sarana penunjang kepariwisataan yang memungkinkan pengembangan Desa Wisata berbasis pemberdayaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membuat desain tempat wisata yang dapat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memilih *spot* lokasi yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan *spot* lokasi yang lain.

2. Latar Belakang Teori/Teknologi

Maslow (1943) membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan berdasarkan skala prioritas pemenuhannya. Tingkatan pertama berupa kebutuhan paling mendasar yakni kebutuhan untuk bertahan hidup meliputi makanan, minuman, udara, dan sebagainya. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan akan perlindungan terhadap bahaya meliputi rasa lepas dari bahaya fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusakan dan bencana dunia. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang sesama. Kebutuhan ini meliputi desakan untuk berteman, hasrat memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial dengan lingkungan dan dalam organisasi. Tingkatan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori tentang kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan. Sekali manusia mampu memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri, kebutuhan paling tinggi. Tingkatan kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan hasrat yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Maslow (1943) melukiskan

kebutuhan ini sebagai hasrat untuk makin dibuat menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, dibuat menjadi apa saja menurut kemampuannya sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Teori Kebutuhan Manusia (Maslow, 1943)

Berdasarkan gambar rumusan teori kebutuhan tersebut di atas, maka kebutuhan akan berekreasi termasuk mengunjungi desa wisata merupakan kebutuhan pada tingkatan kelima berdasarkan pembagian kebutuhan yang tersaji pada Gambar 1.

Pendapat ilmiah yang lain terkait dengan kepariwisataan, desa wisata, dan pemberdayaan secara berturut-turut dikemukakan oleh Santoso S. Dkk. (2020) yang mengemukakan bahwa Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan devisa dari wisatawan mancanegara, penyerapan lapangan kerja baik formal maupun informal, perdagangan, dan jasa dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian terutama di sekitar desa tujuan wisata. Industri pariwisata Indonesia menyumbang 5,7% dari *Gross Domestic Product* dan menyerap 9,7% dari total lapangan kerja pada tahun 2019 (WTTC, 2020). Pendapat lain dikemukakan oleh Friedman, C. (2020) yang mengemukakan bahwa pariwisata merupakan salah satu industri unggulan yang berekspansi dan mengalami diversifikasi berkelanjutan. Saat ini, Indonesia telah mendapat pengakuan dari WTC (*World Trade Center*) dengan dikeluarkannya *WTTC Safe Travels Stamp for Safety Protocols* untuk Indonesia pada 24 Juli 2020 (WTTC, 2020). Hal ini menjadi potensi dan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menarik wisatawan, baik dalam maupun luar negeri agar berkunjung ke Indonesia. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan desa wisata di Indonesia yang potensial secara budaya, alam, maupun pengembangan sumber daya manusianya. Cahyana (2019) mengemukakan bahwa pariwisata memiliki beragam jenis yang tersedia di dalamnya, mulai dari pariwisata yang memerlukan kuantitas besar sampai kuantitas kecil (Raya Cahyana & Nugroho, 2019). Tentu saja, disamping memerlukan kuantitas sebagai daya dukung, pariwisata juga harus ditunjang dengan kualitas wisatawan yang saling menguntungkan. Tren pariwisata milenial ternyata lebih akrab ke bagian kuantitas besar tetapi menghasilkan wisatawan yang kualitas rendah. Sayangnya, sampai saat ini praktik tersebut masih terus digencarkan oleh pemerintah pusat. Menurut Sudana (2017) Para ahli sudah memperkirakan bahwa pariwisata yang lebih mementingkan kuantitas di masa mendatang akan merugikan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem yang ada serta pembangunan yang sangat banyak untuk menunjang praktik pariwisata massal. Lebih lanjut Sudana (2017) mengemukakan bahwa target yang disiapkan pemerintah pusat sebesar 20 juta wisatawan yang datang ke Indonesia. Tentunya dalam hal ini, Pulau Bali akan berdampak akan target yang dicanangkan pemerintah tersebut. Ini mampu membuat kapasitas atau daya dukung akan semakin membesar lalu terjadi kebocoran atau yang sering disebut *carrying capacity*.

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak mengubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung (Muljadi, 2012). Soetarso dan Mulyadin (2013) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cenderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Selain keunikan-keunikan tersebut, area atau kawasan desa wisata juga diharuskan memiliki berbagai fasilitas penunjang sebagai kawasan tujuan wisata. Beberapa fasilitas ini akan memudahkan para wisatawan desa wisata dalam melaksanakan kegiatan wisata. Beberapa fasilitas yang biasanya ada di area atau kawasan desa wisata antara lain sebagai berikut: sarana transportasi, telekomunikasi, akomodasi dan kesehatan. Untuk akomodasi, desa wisata dapat menyediakan tempat penginapan yang berupa *homestay* sehingga wisatawan dapat merasakan suasana pedesaan yang asli. Ismayanti (2013) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan atau wilayah pedesaan yang bisa dimanfaatkan atas dasar kemampuan beberapa unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan yang memiliki tema keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang mempunyai ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas pariwisata.

Terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan desa wisata, beberapa pendapat ilmiah secara berturut dikemukakan oleh Paramitha dkk. (2020) yang mengemukakan bahwa setiap daerah mempunyai potensi lokal masing-masing yang dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah daya tarik wisata. Salah satunya adalah pengembangan kegiatan budaya yang diintegrasikan ke dalam pariwisata. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berbasis komunitas, yaitu memasukkan sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (nilai-nilai, norma-norma, adat dan tradisi) yang melekat pada komunitas tersebut dan merupakan unsur penggerak utama kegiatan budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri. Ridderstaat, J. dan Croes, R. (2020) mengemukakan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan atau pembangunan di desa termasuk desa wisata secara partisipatif, kemudian kebijakan harus dapat menyesuaikan, melakukan upaya koreksi dan modifikasi sesuai tuntutan dan perkembangan jaman. Wahyuni, D. (2018) mengemukakan bahwa kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masih rendah baik karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen pengembangan pariwisata maupun peran *stakeholders* lain yang mendominasi sehingga meminggirkan peran masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembangunan pariwisata yang pada gilirannya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal *Community based tourism* (CBT). Putra dan Ismaniar (2020) mengemukakan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memfasilitasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai

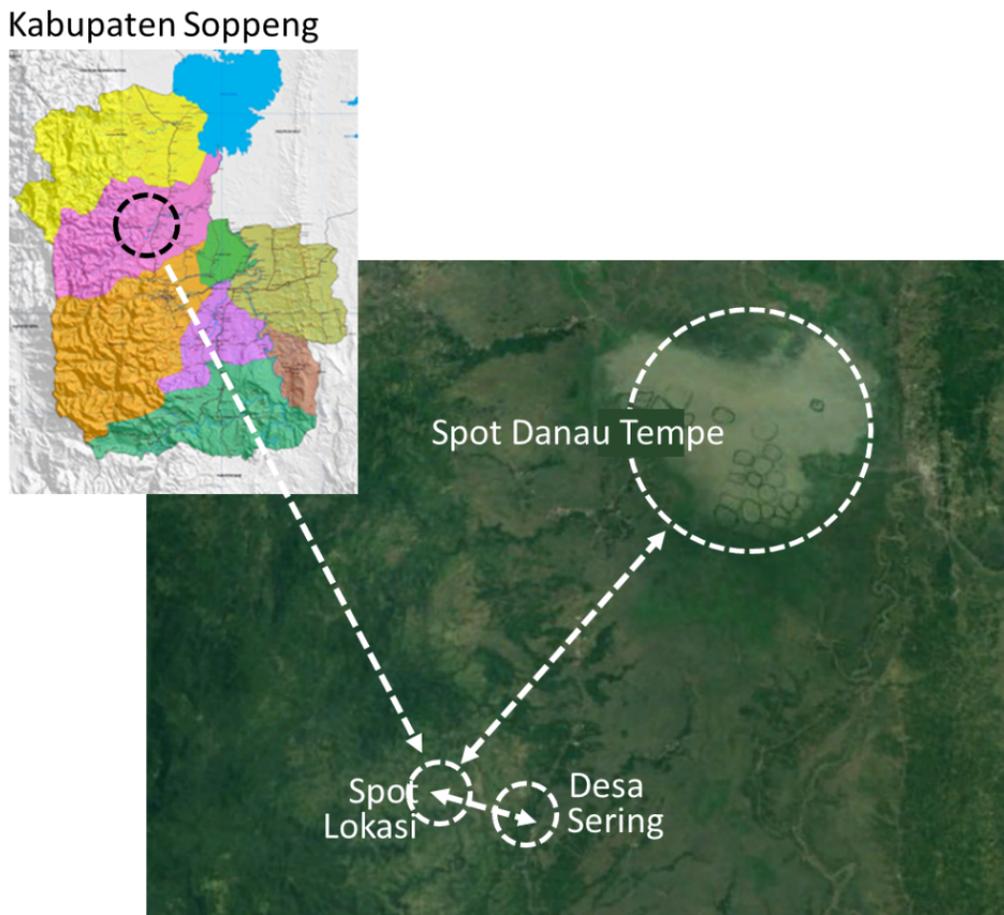
dengan kebutuhan masyarakat. Proses pemberdayaan merupakan usaha pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan nasional sehingga menjadi masyarakat berdaya. Widyarningsih (2019) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam sebuah paradigma baru yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Desa wisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya petani. Mustangin (2017) mengemukakan bahwa melalui desa wisata, masyarakat akan diuntungkan melalui banyaknya wisatawan yang mengunjungi dan berbelanja di tempat itu sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yaitu pengembangan wisata berbasis pedesaan (Desa Wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Andrianto R.H., dan Damayanti M. (2018) mengemukakan bahwa dalam konsep desa wisata, kegiatan pariwisata sangat bergantung kepada aspek sosial budaya yang berkembang dan keadaan aspek lingkungan yang juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Selanjutnya kegiatan pariwisata yang ada dapat mempengaruhi aspek ekonomi terutama kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pariwisata diharapkan dapat menggerakkan industri kecil ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kapasitas yang lebih untuk mengelola dan menjalankan sesuatu dalam hal ini mengelola desa wisata secara mandiri. Adanya pemberdayaan masyarakat nantinya akan memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat serta terwujudnya desa wisata yang berkelanjutan. De Beer (2005) mengemukakan bahwa pengelolaan desa wisata diharapkan akan berkembang dengan baik, salah satunya melalui perencanaan berbasis masyarakat. Perencanaan berbasis masyarakat adalah bentuk perencanaan yang berfokus pada tingkat akar rumput komunitas sebagai alternatif dari pendekatan *top down*. Kumar (2005) mengemukakan bahwa ada banyak definisi sebuah komunitas dari para ahli geografi menekankan aspek spasial dalam definisi mereka, para ekonom memeriksa pekerjaan dan pasar sedangkan sosiolog menekankan interaksi sosial dan jaringan di dalamnya merupakan definisi komunitas. Secara umum, berbagai definisi komunitas semuanya menggunakan beberapa kombinasi ruang, orang, dan interaksi sosial.

3. Metode untuk Menangani Permasalahan

3.1 Eksplorasi Lokasi, Observasi Awal, dan Wawancara Informal

Eksplorasi lokasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi lapangan yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi pengabdian. Observasi lokasi dimaksudkan untuk merekam potensi dan permasalahan yang terkait dengan rencana pengembangan *spot* wisata desa. Selanjutnya, rencana pengabdian dikoordinasikan dengan pemerintah desa dalam rangka menjaring aspirasi terkait dengan rencana pengembangan *spot* kepariwisataan yang berlokasi di tempat strategis desa. Aspek legalitas lokasi terkait dengan kepemilikan lahan juga menjadi aspek yang penting dikoordinasikan dengan pihak pemerintah desa. Selain observasi lapangan, kegiatan “uji rencana” juga diintegrasikan ke dalam

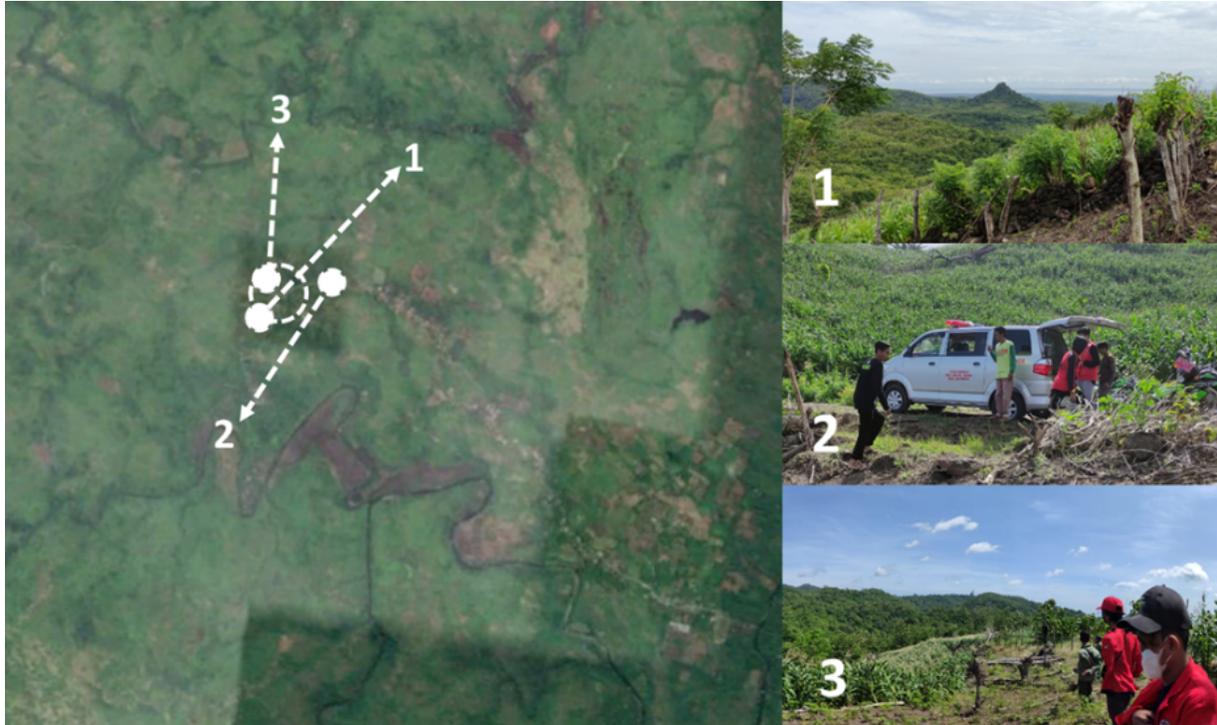
program-program komunikasi mahasiswa KKN dengan masyarakat di lokasi melalui kegiatan seminar program kerja mahasiswa KKN. Kegiatan seminar program kerja mahasiswa KKN dijadikan momentum untuk sosialisasi sekaligus sarana untuk mengukur antusiasme masyarakat terkait dengan rencana desain *spot* wisata di desa/lokasi pengabdian. Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN membantu melakukan wawancara terstruktur yang isinya berupa pertanyaan seputar pemahaman mengenai desa wisata, kebutuhan prasarana dan sarana, aktivitas ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, potensi sumber daya manusia terkait pengelolaan, tingkat kesadaran warga terkait pemeliharaan dan keberlanjutan, dan tingkat penerimaan warga terkait rencana pengembangan *spot* wisata di desa/lokasi pengabdian.



Gambar 2. Posisi Geografis Lokasi Pengabdian Masyarakat (Google Earth, 2022)

Secara administratif, lokasi pengabdian berada di wilayah Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dengan jarak dari kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sejauh kurang lebih 220 kilometer yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Jarak tempat wisata dari Desa Sering sejauh kurang lebih 1,5 kilometer yang juga dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Dari aspek topografi, posisi lokasi pengabdian berada di ketinggian antara 200 hingga 300 meter dari permukaan laut. Dengan ketinggian seperti itu, menempatkan lokasi ini berada di ketinggian yang memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi daerah-daerah yang berada di sekitarnya termasuk Danau Tempe yang

merupakan salah satu obyek wisata unggulan di Kabupaten Wajo yang berjarak kurang lebih 18 kilometer dari *spot* lokasi. Begitu pula halnya dengan kondisi *site* rencana yang berkontur memungkinkan untuk melakukan rekayasa teknis sedemikian rupa sehingga tampilan arsitektur *spot* penunjang desa wisata yang direncanakan menjadi lebih artistik.



Gambar 3. Kondisi Eksisting *Spot* Lokasi Pengabdian Masyarakat dan Arah Foto *Spot* Lokasi

Kondisi eksisting arah foto sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3 membagi 3 arah foto sebagai berikut: arah foto 1 adalah arah foto dari *spot* utama *site* perencanaan yang mengarah pada posisi Danau Tempe di kejauhan dengan pada posisi yang lebih rendah; arah foto 2 adalah arah dari *spot* sisi jalan di sebelah jalan posisi *spot* utama *site* yang direncanakan sebagai *spot* pelataran untuk memandangi *view* ke panorama lembah di bawahnya termasuk ke arah Danau Tempe; arah foto 3 adalah arah dari *spot* pelataran sisi barat ke arah sisi gunung pada arah utara *site* perencanaan.

3.2 Strategi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Strategi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lokasi dilakukan dalam dua bagian yaitu strategi yang berbasis non fisik, dan strategi yang berbasis fisik. Strategi non fisik dilakukan dengan pembagian *leaflet* di tempat-tempat strategis seperti halaman mesjid, pos ronda, dan lokasi-lokasi kegiatan bersama warga desa. Strategi berbasis fisik yang menghadirkan kurang lebih 40 orang peserta dilakukan dengan pembentukan secara bersama-sama Forum Sadar Wisata Desa di yang melibatkan ibu-ibu PKK dan unsur pemuda Karang Taruna dengan menempatkan unsur pemerintahan formal dalam hal ini Kepada Desa Sering sebagai pembina forum. Forum ini akan bertugas secara *ad-hoc* untuk mengatur pengelolaan *spot* prasarana dan sarana penunjang pariwisata desa di lokasi pengabdian sehingga kemaslahatan bagi warga desa sebagai bagian penting dari desa wisata dapat dilestarikan dalam semangat keberlanjutan.

Metode penilaian/asesmen pasca pelaksanaan desain pengembangan *spot* penunjang wisata desa dilakukan melalui instrumen wawancara informal yang diintegrasikan ke dalam kegiatan seminar mahasiswa yang dilakukan di balai desa dengan jumlah peserta yang signifikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Materi asesmen yang yang diberikan adalah penilaian kesiapan warga desa dalam ikut serta dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana penunjang wisata desa dalam semangat kegotongroyongan serta kesiapan warga desa di dalam implementasi pemanfaatan prasarana dan sarana wisata desa berdasarkan aturan yang telah disepakati secara bersama-sama.

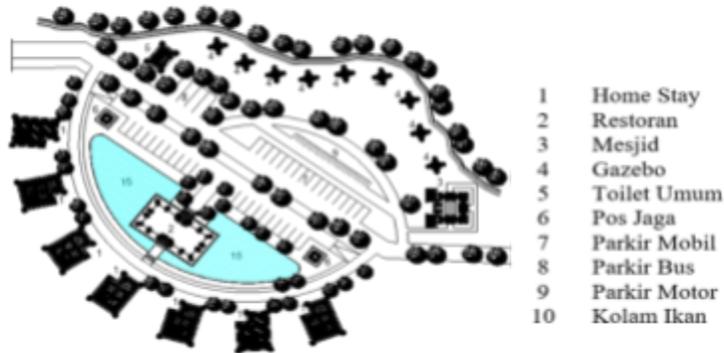


Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Desa Wisata di Lokasi Pengabdian Masyarakat

4. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lokasi pengabdian, sesungguhnya tidak dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua bulan. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Soppeng didahului dengan kegiatan penyampaian secara informal kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Soppeng bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana KKN mahasiswa Universitas Hasanuddin di Kabupaten Soppeng pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Selanjutnya, kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi kegiatan dilakukan secara intensif pada periode Bulan Juni hingga Agustus 2022 bersamaan dengan pelaksanaan KKN Gelombang 108 di Kabupaten Soppeng di mana beberapa kegiatan pengabdian masyarakat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan KKN terutama pada pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan asesmen terhadap penerimaan program pengabdian yang dilaksanakan di lokasi.

Desain prasarana dan sarana penunjang wisata desa direncanakan di area seluas kurang lebih 1,8 Hektar dengan rincian fungsi-fungsi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5. *Site Plan* Prasarana dan Sarana Penunjang Desa Wisata di Lokasi Pengabdian



Gambar 6. Fungsi *Homestay*, Fungsi Mesjid, Fungsi Gazebo, dan Fungsi Pos Jaga di *Site* Perencanaan Prasarana dan Sarana Penunjang Desa Wisata di Lokasi Pengabdian

Desain Prasarana dan Sarana Penunjang Desa Wisata di Lokasi Pengabdian sesungguhnya direncanakan berada pada *spot* yang secara alami sudah sering dikunjungi oleh warga masyarakat sebagai tempat bersantai dan menikmati panorama alam meskipun belum tersedia prasarana dan sarana penunjang, begitu pula dengan kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik. Secara arsitektural, unit-unit bangunan yang direncanakan ada di *spot* lokasi antara lain: *homestay*, restoran (yang sekaligus sebagai ruang tempat pengelola), mesjid, gazebo, toilet umum, pos jaga, fasilitas parkir, dan kolam ikan sebagai pelengkap suasana wisata. Posisi *homestay* sengaja dipilih pada *spot* tertinggi di lokasi dalam rangka memberikan *view* yang baik ke arah lembah dan ke arah Danau Tempe di kejauhan. Selanjutnya, posisi restoran dan gazebo serta mesjid berada pada level tertinggi kedua setelah posisi *homestay* yang memungkinkan pengunjung dapat melihat langsung ke arah lembah kehijauan yang ada di bawahnya.

Suasana akseptabilitas/penerimaan warga terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi, pada awal pelaksanaan kegiatan menemukan kendala yang terkait dengan pemahaman warga desa mengenai desa wisata yang dalam banyak kasus tidak jarang menimbulkan masalah sosial yang lain yang tidak terduga sebelumnya. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan mahasiswa KKN di lokasi bahwa pengelolaan *spot* prasarana dan sarana penunjang wisata desa yang digagas akan dikelola sepenuhnya oleh warga desa, stigma itu kemudian pelan-pelan dapat dihilangkan. Mekanisme sosialisasi tidak hanya dilakukan pada momen seminar mahasiswa, tetapi dilakukan pada berbagai kesempatan bertemu dengan warga desa di luar pertemuan reguler. Misalnya, mahasiswa KKN bertemu dengan warga desa di lokasi aktivitas pencaharian warga desa seperti di kebun, di sawah, bahkan di lapangan olahraga di sore hari dalam suasana yang tidak formal. Upaya sosialisasi lain juga dilakukan melalui ibu-ibu PKK di dalam kegiatan-kegiatan pengajian warga yang dilakukan secara bergiliran di beberapa wilayah dusun yang ada, serta melalui kegiatan-kegiatan remaja mesjid dan kegiatan kepemudaan lainnya.

Jumlah responden yang menjawab kuesioner pada fase sebelum kegiatan sebanyak 38 orang, pada fase setelah kegiatan sebanyak 42 orang. Selanjutnya, distribusi jawaban responden atas pertanyaan mengenai pemahaman dan penerimaan warga terkait desa wisata di lokasi pengabdian digambarkan dalam pada Tabel 1.

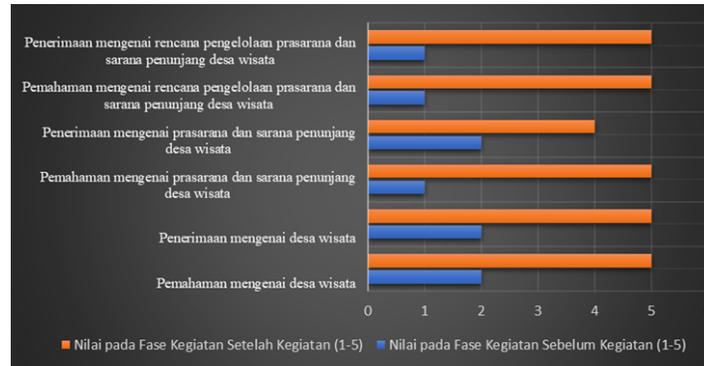
Tabel 1. Perbandingan Pemahaman dan Penerimaan Desain *Spot* Prasarana dan Sarana Penunjang Desa Wisata Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No.	Indikator Penilaian	Nilai pada Fase Kegiatan	
		Sebelum Kegiatan (1-5)	Setelah Kegiatan (1-5)
1.	Pemahaman mengenai desa wisata	2	5
2.	Penerimaan mengenai desa wisata	2	5
3.	Pemahaman mengenai prasarana dan sarana penunjang desa wisata	1	5
4.	Penerimaan mengenai prasarana dan sarana penunjang desa wisata	2	4
5.	Pemahaman mengenai rencana pengelolaan prasarana dan sarana penunjang desa wisata	1	5
6.	Penerimaan mengenai rencana pengelolaan prasarana dan sarana penunjang desa wisata	1	5
	Jumlah Nilai	9	29

Keterangan jawaban responden:

- 1 : Sangat tidak paham dan kurang menerima
- 2 : Tidak paham dan kurang menerima
- 3 : Cukup paham dan cukup menerima
- 4 : Paham dan menerima
- 5 : Sangat paham dan sangat menerima

Tabel di atas menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan antara sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pemahaman dan penerimaan warga desa terkait desa wisata, prasarana dan sarana penunjang, serta rencana pengelolaan dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Perbandingan Sikap Pemahaman dan Penerimaan Warga terkait Perencanaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Desa Wisata di Lokasi Pengabdian

Hasil sosialisasi dan komunikasi intensif seperti disebutkan di atas berhasil mengubah asumsi warga dari sikap negatif dan ragu-ragu menjadi antusiasme dan harapan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi. Antusiasme warga tersebut yang kemudian diolah dan diterjemahkan ke dalam desain arsitektur *spot* prasarana dan sarana penunjang desa wisata sebagaimana disajikan pada Gambar 5 dan Gambar 6.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk desain *spot* prasarana dan sarana penunjang desa wisata di Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng serta pembentukan pengelola *spot* penunjang dimaksud merupakan upaya untuk mengadvokasi warga tentang pentingnya upaya bersama dalam membangun keberdayaan dari aspek ekonomi warga. Jadi terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan terhadap pemahaman peserta sebesar 67%, dari 30% menjadi 97%. Tingkat pemahaman dan penerimaan warga terhadap kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi menunjukkan nilai yang sangat signifikan dalam perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Ini dibuktikan dengan nilai atau angka yang dirumuskan dari rekaman aspirasi warga terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi pengabdian.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segenap kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk pembiayaan melalui DIPA Fakultas Teknik Tahun 2022, kepada Ketua Departemen Arsitektur yang telah membantu proses administrasi pelaksanaan kegiatan, kepada unsur pemerintahan, tokoh pemuda, segenap warga masyarakat Desa Sering, dan mahasiswa KKN Gelombang 108 yang telah membantu dalam proses observasi lapangan hingga pelaksanaan komunikasi dan diskusi dengan unsur pemerintahan dan warga di lokasi pengabdian.

Daftar Pustaka

- Andrianto, R. H., & Damayanti, M., (2018). TEKNIK PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata, Studi Kasus : Desa Wisata Pentingsari, DIY. *Jurnal Teknik PWK*, 7(4), 242–250. Terdapat pada laman <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>.
- Cahyana, (2019). Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol. 7, no. 2, Tahun 2019, p-ISSN:2338-8811,e-ISSN: 2548-8937.
- de Beer, F., (2005). Rural Communities, The Natural Environment and Development—Some Challenges, Some Successes. *Community Development Journal*, 40(1), 50–61. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi006>.
- Friedman, C., (2020). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam yang Berkelanjutan di Setu Cileunca, Kabupaten Bandung. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 125-140.
- Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation-Volume 2, No. 1, April 2019 eISSN: 2654-4687 pISSN: 2654-3893.
- Ismayanti, (2013). *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Grasindo, Halaman 51.
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M., (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2). Terdapat pada laman <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>.
- Kumar, C. (2005). Revisiting ‘Community’ in Community-Based Natural Resource Management. *Community Development Journal*, 40(3), 275–285. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi036>.
- Masitah, (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945*, vol. 6, no. 3, Bulan September Tahun 2019.
- Maslow, A.H., (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*. 50 (4): 370–96. CiteSeerX 10.1.1.334.7586.
- Mustangin, (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji. *Jurnal Pemikiran dan penelitian Sosiologi. Universitas Padjajaran*. Vol 2 No (1).
- Komariah, N., Encang Saepudin, Pawit M. Yusup, (2018). *Jurnal Pariwisata Pesona*, vol. 03 No. 2, Desember 2018: p 158-174 Print ISSN: 1410-7252 | Online ISSN: 2541-5859.
- Paramitha dkk., (2020). Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol. 2 No. 1. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.23960/administrativa.v10i1.24>.
- Soetarso, P., dan Mulyadin R.M., (2013). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. *Jurnal*, halaman 38.
- Putra dan Ismaniar, (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, 1(2), 1–10.
- Ridderstaat, J., & Croes, R., (2020). A Framework for Classifying Causal Factors of Tourism Demand Seasonality: An Interseason and Intraseason Approach. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 20(10): 1-28, Terdapat pada laman <https://doi.org/10.1177/1096348020912452>.

- Santoso S. Dkk., (2021). Pengembangan Desa Wisata berkonsep Kapasitas Inovasi Daerah di Desa tanjungjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia* 15(2) (2021), P-ISSN: 1907-9419E-ISSN: 2685 -9076.
- Sudana, I.P., (2017). *Pariwisata Massa vs Pariwisata Alternatif*, dalam Nugroho, dkk (ed) *Tren Pariwisata Milenium: Diskursus dengan Alam, Bahasa, Sejarah, dan Pasar*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C., (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 29-33. Terdapat pada laman <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>.
- Wahyuni, D., (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 9, No. 1 Juni 2018 ISSN: 2086-6305 (print) ISSN: 2614-5863 (electronic). Terdapat pada laman <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084> link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>.
- Widyaningsih, H., (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Sosial Budaya di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman. *Journal of WTTC*, (2020). *Economic Impact Reports, World Travel & Tourism Council, 2020*.